

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” In *Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*, 1–17, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press, 2021.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. 2nd ed. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, and Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, 2021.
- Maulidiah, Sri. *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)*. Bandung : CV. Indra Prahasta, 2014.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Maha Karya Pustaka, 2019.
- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1995.
- Rumidi, Sukandar. *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok : UI-Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Soetami, A. Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : Pustaka Harapan, 2013.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum : (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Utrecht, Ernst. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986.

Widjaja, A.W. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta : Rajawali, 2009

Wignjosuebrot, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode Dan Masalah*. Jakarta : Elsam, HuMa, 2002.

JURNAL.

Ananda, Dewo Deddi. "Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.3 (2023).

Rinaldi, Kasmanto. "Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi Yang Melakukan Pelanggaran Di Luar Sekolah." *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 1 (2022)..

Saraswati, Retno. *Perkembangan Pengaturan Sumber dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Media Hukum/ Vol. IX/No2/April-Juni/ 2009* No ISSN 1411-3759.

Syuhudi, Ichsan. "Media Komunikasi dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Pena Justitia Vol. 17 No.01*.

Tiara, Rika Anggun, and Chadijah Rizki Lestari. "Penerapan Aturan Hukum Terkait Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Umum Pada BUMN (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 6, no. 1 (2022).

W, Andjar Pachta. "Peranan Badan-Badan Usaha Negara Di Indonesia." *Hukum Dan Pembangunan*, 1983, 417–27. <https://bit.ly/4dNydgs>

Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 19, no. 3 (2007): 387–98.

Wuaten, Franky Mogi. "The Role of Sustainable Finance and Technology at Bank BJB in Supporting the Sustainable Development Goals." *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)* 5, no. 1 (2023): 97–108.

UNDANG – UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. Undang – Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

SUMBER INTERNET

Idris, Muhammad. "Fungsi Dan Tujuan BUMN Di Indonesia." *kompas.com*, 2023.

<https://money.kompas.com/read/2023/04/02/140758426/fungsi-dan-tujuanbumn-di-indonesia>.

Panrb. "Jejak Langkah & Kiprah Pengabdian Kementerian PANRB." *panrb*, 2013.

<https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/kiprah-pengabdian-kementerian-panrb>.

Pratama, Aswab Nanda, and Bayu Galih. "Sejarah PNS, Dari Pekerjaan Bumiputra Di Era Kolonial Hingga Politisasi Korpri." *kompas.com*, 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/14423261/sejarah-pns-daripekerjaan-bumiputra-di-era-kolonial-hingga-politisasi>

Putra, Muslimin B. "Mengenal Pelayanan Publik." *Ombudsman*, 2020.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>.

Saragih, Ahmad Alamsyah. "2019: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan." *Ombudsman*, 2020. <https://ombudsman.go.id/news/r/2019-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan>

Seknas FITRA. “Anggaran Negara Dilahap Para Pejabat Yang Merangkap.” Seknas FITRA, 2023. <https://seknasfitra.org/anggaran-negara-dilahap-para-pejabat-yang-merangkap/>